

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penentuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi pusat dan daerah. Keduanyaapun merupakan akibat dari pertumbuhan pendapatan pusat serta daerah yang dinilai sebagai tolok ukur perkembangan pembangunan dan pertumbuhan kesejahteraan daerah.

Berbicara mengenai pembangunan dan pertumbuhan daerah, pada awal 2001 Indonesia menganut sistem baru dalam pengelolaan pemerintahan dari sistem sentralisasi fiskal menjadi sistem desentralisasi fiskal atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah (OTDA) yang sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Adi, 2005). Pelaksanaan desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab (Sidik dkk,2002).

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan selama ini telah banyak membawa perubahan besar pada sistem tata kelola pemerintahan baik ditingkat pusat dan daerah. Salah satu perubahan penting adalah kewenangan daerah yang semakin besar dalam menentukan kebijakan belanja daerah. Daerah mempunyai keleluasaan untuk mengalokasikan belanjanya kedalam pos-pos belanja yang dianggap prioritas sesuai dengan preferensi masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan konsep *Fiscal Federalism* yang menyatakan bahwa “Daerah lebih paham apa yang terbaik buat mereka”.

Belanja pemerintah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas sektor swasta di daerah yang bersangkutan. Belanja yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan menurunnya aktivitas sektor swasta.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi di daerah semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah.

Kewenangan daerah yang besar dalam mengelola keuangan daerah tentunya mempunyai dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, PDRB merupakan salah satu indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Di provinsi Jawa Timur Realisasi belanja APBD tahun 2010 mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inisiatif Gubernur Jatim dalam mengawal realisasi APBD agar lebih baik dan terus mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan UMKM, perbaikan infrastruktur pertanian, program penanganan permasalahan gagal panen dan program pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, nilai realisasi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Pada triwulan III-2010, realisasi belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai 63,59% atau setara dengan Rp. 4,977 milyar. Nilai ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan target Pemprov Jatim (75%), namun lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2009 (49,7% atau Rp. 3,777 milyar).

Realisasi terbesar pada triwulan ini adalah pada anggaran belanja bantuan bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp. 974,563 milyar atau 89,25%. Besarnya nilai realisasi anggaran ini selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam peningkatan nilai bagi hasil kepada kabupaten/kota guna meningkatkan perekonomian di daerah.

Sementara itu, tingkat belanja modal APBD Jatim dari total nilai belanja pemerintah pada triwulan III-2010 masih relatif kecil, yaitu sebesar 47,64%. Rendahnya tingkat realisasi ini disebabkan karena masih banyaknya proyek yang terkendala pada proses pembebasan lahan. Secara keseluruhan nilai belanja modal masih relatif kecil dibandingkan jenis belanja langsung lainnya, padahal peningkatan alokasi jenis belanja ini masih diharapkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur

Studi baru dari Bank Dunia menyebutkan, perekonomian Jawa Timur tumbuh stabil dan secara rata-rata diatas angka pertumbuhan nasional dalam kurun 5 tahun terakhir, yakni sebesar 6,8 persen pada tahun 2010. Hal ini didorong sektor pertanian dan industri pengolahan, dan didukung sumber daya manusia yang tersedia. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Khususnya, belum ada perubahan signifikan dalam pola belanja daerah; kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan; begitu juga kualitas sumber daya manusia.

Tabel 1.1.
Data Belanja Publik dan Pertumbuhan PDRB Indonesia dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2001-2010 (dalam Milyar)

TAHUN	INDONESIA		JAWA TIMUR	
	BP (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	BP (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2001	31351.5	3.45	4125073.38	3.34
2002	110333.6	3.69	12868828.09	4.78
2003	121404.1	4.76	14096288.38	4.78
2004	126248.7	5.03	14782330.12	5.83
2005	136425.6	5.68	15856829.13	5.84
2006	147563.7	5.50	17232920.38	5.80
2007	153309.6	6.28	18654412.12	6.11
2008	169297.2	6.01	20816849.99	5.94
2009	195834.4	4.58	23398129.75	5.01
2010	196397.6	5.80	26547735.58	6.89

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur

Di provisini Jawa Timur, belanja di tingkat provinsi lebih terfokus pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan bagi daerah bawahan untuk sektor-sektor sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sementara di tingkat kabupaten /kota, belanja terbesar dialokasikan kepada belanja pegawainya. Dengan ini, Jawa Timur masih dapat meningkatkan belanja daerah di sektor infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan kabupaten/kota. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan arus barang, orang, dan informasi ke pusat-pusat kegiatan perekonomian.

Jika dilihat dari sisi kewilayahan, pola pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan adanya wilayah yang sangat maju dan wilayah yang masih tertinggal. Agar pola pertumbuhan ini menjadi lebih berimbang, pemerintah provinsi dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan untuk memungkinkan penduduk daerah tertinggal lebih memaksimalkan manfaatnya. Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian yang menjadi tulang punggung provinsi, khususnya pertanian dan industri.

Tantangan pemerintah provinsi Jawa Timur kedepan adalah bagaimana memposisikan APBD sebagai instrumen untuk mempercepat tercapainya sasaran-sasaran pembangunan di berbagai sektor. APBD juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan secara signifikan, sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kemudian muncul sebuah pertanyaan mengenai kemaksimalan penggunaan anggaran belanja publik diprovinsi Jawa Timur. Jika keduanya antara Belanja Publik dan Pertumbuhan PDRB memang terkait maka pertumbuhan PDRB haruslah diiringi dengan pemaksimalan penggunaan belanja publiknya. Mengingat bahwa pertumbuhan PDRB merupakan angka yang mewakili pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian tingkat daerah. Untuk membuktikan hal tersebut maka penelitian ini mencoba menganalisis hubungan kausalitas antara keduanya, yakni Belanja Publik dan Pertumbuhan PDRB

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan PDRB Jawa Timur berdampak pada Belanja Publik di Provinsi Jawa Timur Periode 1984 – 2010?
2. Apakah Belanja Publik berdampak pada Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur Periode 1984 – 2010?
3. Apakah ada hubungan kausalitas antara Belanja Publik dan Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur periode 1984 – 2010?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana dipaparkan di muka:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan PDRB berdampak pada Belanja Publik di Provinsi Jawa Timur Periode 1984 – 2010
2. Untuk mengetahui apakah Belanja Publik berdampak Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur Periode 1984 – 2010
3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan kausalitas antara belanja publik dan pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur Periode 1984 – 2010

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis itu sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Aspek teoritis hasil kajian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan empiris terhadap kepustakaan tentang “Hubungan Kausalitas Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Timur”.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan akan menambah pengetahuan tentang teori maupun praktik-praktik ilmu ekonomi pada pemerintahan di Indonesia, sebagai sumber referensi untuk penelitian terkait. Khususnya bagi pembaca mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.

3. Bagi Pemerintah

Memberi masukan bagi pemerintah, khususnya sejauh mana pemerintah daerah pada masa otonomi mengelola anggaran belanja daerahnya masing-masing dan membuka wawasan baru mengenai Hubungan Kausalitas antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Kerangka sistem penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, disesuaikan dengan materi pembahasan yang diteliti. Secara umum pembahasan tiap bab (terdiri dari beberapa sub bab) dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membuat uraian tentang landasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan maupun literatur-literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga dicantumkan mengenai penelitian sebelumnya serta model analisis yang digunakan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membuat uraian tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek penelitian, hasil penelitian yang disertai pula dengan hasil akhir pengolahan, analisa dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai simpulan-simpulan dan uraian pembahasan serta saran-saran atas hasil penelitian yang dilakukan.